



STRATEGI PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT

Executive Summary

BAPPEDA

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

PROVINSI JAMBI

2019

PENDAHULUAN

Sumber Daya Perikanan, khususnya sumber daya perikanan yang bersifat “*open access*” yang dapat dimanfaatkan/dikelola masyarakat umum karena sifatnya “*public proverty*” harus dikelola dengan baik dan lestari. Oleh karena itu dalam pengelolaanya harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan demi generasi yang akan datang. Menurut *World Convention Economic Development/WCED* (1987), bahwa pengelolaan sumber daya alam yang baik yang dikenal dengan “*Sustainable Devolopment*”, yaitu prinsip pembangunan yang berkelanjutan yaitu adanya keseimbangan antara lingkungan, ekonomi dan sosial. Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan sumberdaya perikanan aspek kelestarian ekosistem perairan tersebut, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar serta sosial diterima oleh norma masyarakat setempat.

Sumberdaya perikanan merupakan sumber daya yang dapat pulih (*Renewable Resources*) sepanjang dalam pengelolaannya menerapkan prinsip ramah lingkungan yaitu tidak dicemari badan air baik oleh aktifitas perikanan (budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan) atau aktifitas diluar perikanan seperti membuang limbah ke badan air, penggunaan pestisida sektor pertanian yang mengalir ke perairan umum, tumpahan minyak, eksploitasi seputar aliran sungai yang menyebabkan kekeruhan pada perairan umum dll. Aktifitas ini tidak hanya membahayakan organisme dan tumbuhan perairan, tetapi juga dapat membahayakan manusia.

Saat ini masih sering ditemui aktivitas menangkap ikan dengan jalan pintas yang dapat merusak lingkungan dan bahkan dapat membahayakan jiwa manusia seperti: penangkapan ikan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan pledak, alat tangkap yang tidak selektif sehingga akan menangkap ikan dari yang sangat kecil sampai



ikan besar bahkan induk ikan. Sedangkan cemaran perairan diluar aktifitas perikanan sangat masif yang hanya mementingkan ekonomi semata dan memandang sebelah mata terhadap dampak negatif yang dialami ekosistem perairan.

Peningkatan jumlah nelayan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Rumah tangga/perusahaan Perikanan Laut menggunakan motor berpotensi memunculkan berbagai konflik dalam persaingan pemanfaatan sumberdaya ikan, terkait isu teknologi, nelayan kecil sering kali kalah bersaing dengan nelayan modern.

Perikanan tangkap nasional masih dicirikan oleh perikanan tangkap skala kecil.Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan perikanan tangkap di Indonesia yang masih didominasi oleh usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu sekitar 85% (Hermawan,2006)

Untuk itulah dengan penyusunan dokumen “Strategi Pelestarian Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat” diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan sumber daya perairan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas, bisa dirumuskan suatu permasalahan dalam perikanan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendukung perekonomian daerah dengan Suatu Strategi Pelestarian SUMberdaya Perikanan Provinsi Jambi yang berbasis masyarakat guna meningkatkan produksi, meningkatkan mutu, menstabilkan harga, ketersediaan sarana produksi, memperkuat jaringan pemasaran atau pasca panen dalam wilayah Provinsi Jambi serta perlu membuat suatu kebijakan kedepan dengan suatu analisis kesesuaian aktifitas budidaya pada setiap daerah atau setiap aktifitas budidaya itu sendiri.

Tujuan

Tujuan analisis ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana kondisi, potensi dan pemasalahan wilayah yang ada di Provinsi Jambi serta menganalisis bagaimana wilayah pembangunan dapat ditetapkan



sebagai kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi secara teoritis dan sesuai dengan permasalahan yang ada di kabupaten/kota tersebut. Secara ringkas tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasinya sumber daya perikanan berbasis masyarakat.
2. Mengetahui permasalahan terkait pengelolaan sumberdaya perikanan.
3. Menyusun strategi pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

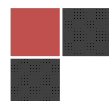
Manfaat

Selain sebagai sarana dan proses studi analisis mengenai pembangunan wilayah, juga diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten/kota agar kebijaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi dan potensi wilayah.selain itu, akan mempermudah pemerintah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah pada Wilayah Pembangunan masing-masing yang bermuara pada pertumbuhan wilayah yang lebih merata di bawah kontrol pemerintah daerah.
2. Memberikan masukan tetang analisis pembangunan wilayah di daerah studi analisis, sehingga dapat dijadikan tambahan informasi dalam pembangunan regional dan juga sebagai referensi bagi analisis-analisis selanjutnya.

METODOLOGI

Penyusunan Dokumen Strategi Pelestarian Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Provinsi Jambi ini dilaksanakan dari Bulan Oktober-November 2019 dan bertempat dalam wilayah Provinsi Jambi dalam lingkup Kabupaten/Kota



Jenis dan Sumber Data, Teknik dan Model Analisis Data

Dalam analisis ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Biro Pusat Statistik dan instansi pemerintah lainnya, maupun kajian ilmiah yang bersifat referensi informasi dalam penulisan analisis ini (library research). Data sekunder utama berupa data *time series* dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dari periode tahun 2014–2018 (lima tahun). Sedangkan data primer digunakan untuk Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat.

Metode, Teknik dan Model Analisis Data

Metode analisis bersifat kualitatif dan kuantitatif. secara deskriptif menggunakan beberapa alat analisis yaitu: Menunjang Data Basis digunakan teknik Analisis Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, Analisis Indeks Spesialisasi (SI), untuk penentuan dan pengambilan keputusan digunakan Analisis Hierarchy Process (AHP) dan penetapan strategi menggunakan Analisis Matriks SWOT. Pengumpulan data sekunder maupun primer dilakukan dengan cara : wawancara dengan responden, *focus discussion group*, studi pustaka untuk mendapatkan referensi dan informasi pendukung analisis ini.

Perbandingan relatif ini dinyatakan secara matematika rumus Location Quotient (LQ) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{pi/pt}{Pi/Pt}$$

Dimana :

LQ = Location Quotient

pi = Produksi jenis komoditas i pada tingkat kabupaten/kota

pt = Produksi total komoditas pada tingkat kabupaten/kota

Pi = Produksi jenis komoditas i pada tingkat Provinsi Jambi

Pt = Produksi Total komoditas pada tingkat wilayah Provinsi Jambi



Dari hasil perhitungan analisis Location Quotient dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Jika $LQ > 1$; maka komoditas yang bersangkutan ditingkat kabupaten/kota lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan di tingkat provinsi. Komoditas ini dalam perekonomian ditingkat kabupaten/kota memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas “Basis”.
2. Jika $LQ = 1$; maka komoditas yang bersangkutan baik ditingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi memiliki tingkat spesialisasi atau dominan yang sama.
3. Jika $LQ < 1$; maka komoditas yang bersangkutan ditingkat kabupaten/kota kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan di tingkat provinsi. Komoditas ini dalam perekonomian ditingkat kabupaten/kota tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas “Non-Basis”.

Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology)

Alat analisis Tipologi Klassen merupakan gabungan atau perpaduan antara alat analisis hasil bagi lokasi atau Location Quotient (LQ) dengan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Tipologi Klassen dapat digunakan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral maupun daerah. Data yang biasa digunakan dalam analisis ini adalah data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai Komoditi, atau hal lain untuk perbandingan.

Menurut Klassen, alat analisis tipologi wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing – masing daerah. Analisis ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi sektor-sektor dalam perekonomian wilayah dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih tinggi (propinsi).



Analisis Spesialisasi (SI)

Analisis Spesialisasi (SI) berfungsi untuk melihat spesialisasi produksi hortikultura di Kabupaten/Kota terhadap jenis komoditi tertentu.

Analisis ini tergolong juga analisis ekonomi wilayah yang digunakan untuk mengkaji spesialisasi suatu wilayah dalam komoditas agribisnis menurut Baruwadi (2008:2).

Koefisien spesialisasi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SI = \left(\frac{vi}{vt} - \frac{Vi}{Vt} \right) \times 100$$

SI = Spesialisasi Indeks

vi = produksi total faktor analisis jenis *i* di tingkat kabupaten/kota *i*

vt = produksi total faktor analisis jenis *i* di tingkat kabupaten/kota *i*

Vi = produksi total faktor analisis jenis *i* di tingkat Provinsi.

Vt = produksi total faktor analisis jenis Provinsi Jambi

Kesimpulan :

SI > 1 = Terjadinya spesialisasi analisis jenis *i* di kabupaten/kota *i* secara relatif dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah Provinsi Jambi.

SI < 1 = Tidak terjadinya spesialisasi analisis jenis *i* di Kabupaten/kota *i* dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah Provinsi Jambi

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School di awal tahun 1970, yang digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan pilihan dari berbagai alternatif. Dalam penentuan prioritas diperlukan uji konsistensi terhadap pilihan-pilihan yang telah dilakukan. Dalam situasi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan multi faktor dan mencakup berbagai jenjang maupun kepentingan. Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode Analytic



Hierarchy Process ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami yaitu Decomposition, Comparative Judgement ,Synthesis of Priority, Logical Consistency.

Analytic Hierarchy Process mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari Resiprocal Comparison , Homogeneity, Dependence dan Expectation.

Rumus Untuk Menentukan Rasio Konsistensi (CR) Indeks konsistensi dari matriks berordo n dapat diperoleh dengan rumus :

$$CI = \frac{\lambda \text{ maksimum} - n}{n - 1}$$

Dimana :

CI = Indek konsistensi (Consistency Index)

λ maksimum = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n

λ maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan eigen vektor utama. Apabila C.I = 0, berarti matriks konsisten. Batas ketidakkonsistenan yang ditetapkan Saaty diukur dengan menggunakan rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI). Nilai RI bergantung pada ordo matrik n.

Analisis SWOT

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan sistematis dalam rangka penyusunan strategi dan kebijakan yang akan dipilih. Analisis ini berbasis pada cara berpikir logis dalam memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities) serta minimalisasi kelemahan (Weanesses) dan ancaman (Threats) (Rangkuti, 2002).



Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisi yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk kata-kata strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman).

Proses implementasi SWOT diawali dengan: (a) tahapan identifikasi data dan informasi sebagai bahan evaluasi faktor internal dan eksternal; (b) tahapan analisis melalui pemetaan faktor-faktor teridentifikasi dalam bentuk matrik SWOT; (c) tahapan pengambilan keputusan berdasarkan pada tahapan (a) dan (b). Secara garis besar SWOT mengilustrasikan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi untuk mencapai tujuan, disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan antisipasinya.



STRATEGI PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT

LQ Produksi Perikanan, kabupaten/kota

No	Jenis Perairan	Kabupaten/Kota	Tipologi	Spesialisasi Indeks
1	Perikanan Laut (2 Daerah)	Tanjung Jabung Timur (1,98)	Potensial	47,18
		Tanjung Jabung Barat (1,83)	Prima	39,62
2	Perairan Umum (7 Daerah)	Merangin (5,83)	Prima	36,16
		Kota Sungai Penuh (5,35)	Potensial	31,05
		Kerinci (3,88)	Prima	20,48
		Tebo (3,47)	Prima	18,59
		Bungo (2,95)	Prima	14,55
		Kota Jambi (2,89)	Prima	14,16
		Sarolangun (2,73)	Prima	12,95
		Batang Hari (2,18)	Prima	50,36
		Muaro Jambi (2,15)	Potensial	49,69
3	Perikanan Budidaya (9 Daerah)	Sarolangun (1,82)	Prima	35,10
		Kota Jambi (1,80)	Prima	33,90
		Bungo (1,78)	Prima	33,50
		Tebo (1,69)	Prima	29,47
		Kerinci (1,60)	Potensial	27,58
		Kota Sungai Penuh (1,39)	Prima	17,00
		Merangin (1,28)	Prima	11,90

Sumber : BPS Provinsi Jambi (Data diolah)

Dari tabel nilai LQ produksi Perikanan pada jenis perairan laut nilai LQ tertinggi dan termasuk kedalam basis komoditi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai 1,98 dan bertipologi potensial dan Tanjung Jabung Barat memiliki nilai 1,83 namun bertipologi Prima.

Tabel. LQ Perairan Darat; Budidaya Ikan Kolam, Keramba, Sawah, Tambak

No	Perairan Darat	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kolam	Merangin (1,98) Sarolangun (1,39) Kota Sungai Penuh (1,39) Bungo (1,28) Tebo (1,16) Kerinci (1,08) Tanjung Barat (1,05) Muaro Jambi (1,03)	BASIS
2	Keramba	Kota Jambi (0,70)	Non Basis Dengan LQ Tertinggi
3	Sawah	-	-
4	Tambak	-	-



Analisis Penentuan Faktor-faktor penentuan komoditas sasaran secara berkelanjutan

Dari hasil analisis LQ dan SSA telah didapatkan jenis komoditas unggulan dari beberapa komoditi di masing-masing daerah kabupaten/kota. Dari komoditi tersebut akan ditentukan komoditi prioritas pengembangan berdasarkan tinjauan kebijakan pemerintah yang dikompilasikan dengan kriteria lain seperti di atas, dengan nilai Matriks Perbandingan Berpasangan antar kriteria dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel. Bobot Antar Kriteria

Kriteria Strategi	A1	A2	A3	A4	A5
A1 Dukungan Pemerintah	1,00	0,20	0,14	0,33	0,33
A2 Mutu dan Harga Produk	5,00	0,20	0,50	5,00	5,00
A3 Potensial Pasar	5,00	2,00	1,00	7,00	7,00
A4 Kemampuan Investasi/Modal	3,00	0,20	0,14	1,00	1,00
A5 Sumber Daya Manusia	3,00	0,20	0,14	1,00	1,00
	17,00	2,80	1,93	14,33	14,33

Tabel. Nilai Eigen Kriteria

A1	A2	A3	A4	A5	Rata-rata	Total Baris	Eigen Value
0,06	0,07	0,07	0,02	0,02	0,050	0,251	0,24
0,29	0,07	0,26	0,35	0,35	0,264	1,322	1,48
0,29	0,71	0,52	0,49	0,49	0,501	2,504	2,57
0,18	0,07	0,07	0,07	0,07	0,092	0,462	0,46
0,18	0,07	0,07	0,07	0,07	0,092	0,462	0,46
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		λ maks	5,21

Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lainnya, dan dalam hal ini dapat mengarah kepada ketidak konsistensian.



$$CI = (5,21 - 5) / (5-1) = 0,051$$

$$RI = 1,120 \text{ (Tabel RI kriteria 5)}$$

$$CR = 0,051/1,120 = \mathbf{0,046}$$

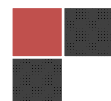
Nilai $0,046 < 0,1$ berarti memiliki nilai yang konsistensi.

Maka dapat dilanjutkan dengan perhitungan selanjutnya dengan perbandingan antar Alternatif pada setiap kriteria, untuk lebih jelasnya alternatif pengembangan pada subsektor perikanan dalam wilayah Provinsi Jambi;

Tabel. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Jenis Perikanan

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Perikanan Laut	0,15	0,26	0,15	0,48	0,08	0,203	2
2	Perairan Umum	0,16	0,08	0,16	0,05	0,19	0,131	3
3	Budidaya	0,69	0,66	0,69	0,48	0,72	0,666	1

Perikanan Budidaya menempati peringkat 1 dengan bobot 0,666, Perikanan Tangkap Laut peringkat 2 dengan bobot 0,203 dan Perairan Umum dengan bobot 0,131. Nilai ini dapat diterjemahkan bahwa perikanan budidaya dapat dijadikan prioritas tujuan dalam pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat dan daerah serta menjaga lingkungan agar tetap dalam keadaan yang optimal.



Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat

EFAS \ IFAS	KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weakness)
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI (SO) = 2,44 + 1,70 = 4,15	STRATEGI (WO) = 1,26 + 1,70 = 2,96
ANCAMAN (Threats)	STRATEGI (ST) = 2,44 + 2,16 = 4,60	STRATEGI (WT) = 1,26 + 2,16 = 3,42

Gambar. Bagan Kombinasi Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat.

Sebagaimana terlihat di dalam Gambar.9, terdapat empat kelompok strategi berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi. Kombinasi strategi yang disajikan pada Tabel . Di atas merupakan analisis model kuantitatif perumusan strategi-strategi yang didasarkan pada jumlah nilai skor pada masing-masing faktor. Berdasarkan tabel tersebut maka kebijakan strategi pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat pada Provinsi Jambi sebaiknya memanfaatkan strategi ST karena mempunyai nilai skor tertinggi jika dibandingkan dengan nilai skor yang lainnya yaitu 4,60. Selanjutnya diikuti dengan Strategi SO dengan skor 4,15 , strategi WT dengan skor 3,42, dan Strategi WO dengan skor 2,96.

Hasil selisih komponen kekuatan dan kelemahan (2,44 – 1,26) adalah 0,592 menjadi posisi titik pada sumbu X , sedangkan selisih komponen pada peluang dan tantangan (1,70 – 2,16) adalah -0,226 menjadi sumbu Y, sehingga yang menandakan kondisi strategi berada pada Kuadran II yaitu Strategi Diferensiasi menggambarkan bahwa situasi yang masoh karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengatasi/mengurangi ancaman.



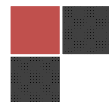
Strategi Strenghts-Threats (ST)

Strategi ini dibuat berdasarkan strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk menghadapi ancaman atau meminimalisirnya yang dapat dilakukan dengan ;

- Menggunakan sumberdaya alam dalam ketersediaan wilayah yang potensial dalam budidaya perikanan yang kurang berdampak dari potensi bencana alam banjir.
- Melakukan budidaya perikanan dengan pilihan komoditi perikanan yang tepat dan bernilai ekonomis tinggi dalam menghadapi kendala biaya produksi harga pakan yang seimbang;
- Memperkuat regulasi ditingkat daerah dalam melindungi usaha dan tindakan hukum yang berat kepada pihak-pihak yang melakukan usaha perusakan sumberdaya perikanan;
- Memanfaatkan Tenaga kerja dalam rumah tangga dalam usaha perikanan sehingga dapat menekan biaya usaha perikanan.

Dari hasil analisa SWOT yang menghasilkan strategi **Strenghts-Threats (ST)** maka selaku pemangku kebijakan strategis dapat melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut;

- Membangkitkan industri hulu dan hilir perikanan, sehingga menyerap tenaga kerja yang tersedia;
- Membuka jalur pemasaran produksi perikanan dan hasil olahan perikanan dengan pihak swasta dan daerah lain guna menampung hasil produk perikanan tersebut;
- Sosialisasi regulasi kelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum agar terjaga plasma nutfah perikanan;
- Memfasilitasi penelitian dan penemuan agar terciptanya pakan yang terjangkau dan memenuhi standard.



Langkah Strategis

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

- a. Pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan kawasan kelautan dan perikanan.
- b. Penguatan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Iptek Dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.
- c. Pengembangan ketersediaan ikan, distribusi, akses, mutu keamanan pangan (perikanan) dan peningkatan usaha serta investasi bidang perikanan.
- d. Melakukan percepatan rehabilitasi ekosistem (seperti re-stocking) dan cadangan Sumber daya Alam Perikanan melalui program sinergis lintas sektoral.

Kebijakan

- a. Pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi berbasis kawasan
- b. Optimalisasi produksi dan produktivitas nelayan, sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan
- c. Memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan dan pengembangan budaya makan ikan.
- d. Perlindungan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui regulasi bertingkat.
- e. Peningkatan penyuluhan guna peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat.

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum

Tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan (over exploitation), investasi berlebihan (over investment) dan tenaga kerja berlebihan (over employment).



Kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya ikan diperairan umum daratan sangat terbatas, sehingga diperlukan suatu upaya Pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai bentuk pengelolaan yang berbasis masyarakat. Masyarakat lokal memiliki sistem sendiri di dalam mengelola sumberdaya alam yang berada disekitar tempat tinggal mereka. Penggalan terhadap nilai kearifan lokal yang ada atau pernah ada di dalam kehidupan masyarakat lokal yang terkait dengan pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan mutlak diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan berbasis masyarakat (Hendrik, 2007; Kartamihardja.*et al*),2014).

Dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan, Masyarakat dan Pemerintah Jambi telah mengembangkan kawasan perlindungan berbasis kearifan lokal, yakni Suaka Mina dan Lubuk Larangan. Perbedaannya, jika Suaka Mina merupakan satu kawasan yang sama sekali ikannya tidak boleh ditangkap, ikan di Lubuk Larangan boleh dipanen namun diatur sesuai adat setempat. Hukum adat setempat sekaligus merupakan manifestasi dari kearifan lokal berisi aturan yaitu dengan membiarkan sebuah lubuk sungai selama 6 bulan hingga 2 tahun tidak dipanen, ikan punya cukup waktu untuk berkembang biak.

Pengembangan Pakan Lokal

Harga pakan hingga saat ini menjadi masalah utama dalam pengembangan budidaya ikan air tawar. Pembudidaya menggunakan pakan lokal yang berharga murah, namun berkualitas di bawah SNI (Sunarno & Marson, 2011). Akibat-nya adalah perairan budidaya dipenuhi oleh limbah pakan dan feses yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan berbagai macam penyakit. Penerapan pakan lokal efisien dan ekonomis telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta (Sunarno, 2012) dan Kabupaten Kampar (Sunarno et al., 2013). Keberhasilan penggunaan pakan lokal berkualitas SNI dengan harga kompetitif perlu dikembangkan terus. Direktorat Jenderal Perikanan



Budidaya, KKP mengembangkan pakan lokal mulai program GERPARI (Gerakan Pakan Mandiri) di sentra-sentra budidaya air tawar khususnya di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Proses produksi ikan dalam wadah budidaya ikan diawali dengan mengandalkan pakan alami dan atau tambahan berupa dedak, sisa kegiatan rumah tangga, dan sisa Pakan alami dan tambahan tidak lagi diandalkan oleh pembudidaya.

Regulasi Kelestarian Sumberdaya Perikanan.

Regulasi kelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum bertujuan agar terjaganya plasma nuftah perikanan agar selalu berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menerapkan strategi-strategi berbasis masyarakat.

1. Penerapan Eco-Labeling di sektor Perikanan.

Dalam upaya untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam pembangunan industri perikanan, perlindungan atau konservasi terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) ikan, maka dunia internasional telah sepakat memberikan dukungan terhadap rencana penerapan label yang disebut dengan “Eco-Labeling”. Landasan hukum yang digunakan adalah beberapa hasil atau nota kesepakatan dalam pertemuan/konfrensi Internasional.

2. Pengelolaan Kawasan Konservasi : Suaka Perikanan

Suaka perikanan merupakan suatu ekosistem perairan yang memiliki daerah yang terbatas dimana melarang semua kegiatan penangkapan biota perairan dengan cara apapun, kapanpun dan oleh siapapun. Kawasan ini memiliki fungsi sebagai tempat pelestarian ikan-ikan endemik yang langka (atau hampir punah) dan beberapa spesies yang dilindungi keberadaannya.

Selain itu pengawasan pengelolaan kawasan konservasi juga perlu didukung oleh Masyarakat sekitar kawasan dalam suatu badan.



Masyarakat tersebut ikut serta dan berperan aktif dalam kelestarian kawasan melalui kegiatan pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan. Selain itu Badan ini juga memelihara dan menegakkan kebiasaan atau adat istiadat penangkapan dan pengelolaan serta menyelesaikan persoalan-persoalan terhadap pelanggaran ketentuan adat yang berlaku.

Suaka perikanan yang ada di Propinsi Jambi sekitar 28 buah dan pada umumnya aktif sebagai daerah suaka (*reservat*). Suaka perikanan yang ada di daerah Jambi pada umumnya merupakan daerah Rawa banjiran (*Oxbow*) yang banyak tumbuhan air (sekitar 20-50%) dan mempunyai hubungan dengan sungai, dimana saat musim hujan luasannya bertambah dan saat musim kemarau perairan ini mengecil bahkan ada yang sampai kering.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pada hasil riset, keberhasilan model pengelolaan suaka perikanan terlihat pada penggunaan pola ko-manajemen yang dilengkapi oleh kemampuan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum dan bantuan lainnya. Dengan adanya penerapan pola ko-manajemen untuk pengelolaan suaka perikanan pada perairan umum daratan di Indonesia diharapkan akan didapatkan model pengelolaan suaka perikanan yang menghasilkan keberlanjutan sumber daya perikanan dan pendapatan masyarakat nelayan. Untuk itu, pengelolaan perairan seperti sungai dan rawa banjiran dalam pembangunan perikanan mengikuti pertimbangan antara lain optimasi pemanfaatan sumber daya dan keseimbangan manfaat antar pengguna (Mellquist, 1992). Hal ini dapat berupa kebijakan mempertahankan upaya penangkapan pada suatu tingkat tertentu yang berhubungan dengan tujuan tertentu (Troadec, 1992).

Saat ini paling sedikitnya tujuh spesies ikan air tawar Jambi yang mengalami kondisi kritis (*critical endanger*). Jenis ikan tersebut antara lain,



arwana silver (*Schlerophages formosus*), ridiangu (*Balantiocheilos melanopterus*), belida (*Notopterus chitala*), baung (*Macrones nemurus*), sepat batik (*Cydochaichthys aroplos*), serandang (*Channa pleurophthalma*), dan tilan (*Mastacembelus erythrotaenia*).

Konservasi

Beberapa jenis ikan perlu diberikan tindakan konservasi karena mengandung nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ekologi, nilai budaya, nilai religi, nilai estetika, dan adanya ancaman kepunahan.

Agar ikan endemik bisa terus bertahan dan populasinya meningkat lagi, perlu dilaksanakan konservasi sumberdaya ikan yang ada di perairan daratan. Prinsip konservasi, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU tersebut diatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik.

Dalam melaksanakan konservasi sumber daya ikan, prosesnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Selain dalam UU, konservasi juga diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang di dalamnya diatur tentang pengelolaan konservasi atau habitat ikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari bahasan pada bab-bab tedahulu dan hasil analisis strategi pelesatarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Provinsi Jambi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Sub Sektor Perikanan Mengalami pertumbuhan sebsar 12 persen sebagai penyokong PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2014-2018.
2. Rata-rata RTUP Perikanan Laut sebanyak 95 persen telah menggunakan Kapal Motor.



3. Produksi perikanan Tangkap Laut Provinsi Jambi sebesar 45.982 ton atau 48,06 persen, produksi perikanan budidaya sebesar 42.536 ton atau 44,45 persen dan produksi perairan umum 7.168 ton atau 7,49 persen.
4. Produksi Perikanan Laut hanya didapat dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur senilai 23.86,4 ton, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 21.719 ton.
5. Rata-rata produksi perikanan darat budidaya, komoditi ikan Nila menempati nilai tertinggi yakni 19.053,43 ton, dari data tersebut, produksi perikanan budidaya ikan nila tertinggi dalam budidaya keramba dan kolam.
6. Produksi Perikanan budidaya terbesar berasal dari Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata 25.493,9 ton dan Kabupaten Batanghari sebesar 10.191,9 ton untuk berbagai komoditi jenis ikan.
7. Perkembangan alat tangkap di perairan umum secara besar mengalami penurunan, yang terbesar terjadi pada Kota Jambi yakni turun sebesar 128,40 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan pada Kabupaten Kerinci sebesar 18,82 persen.
8. LQ produksi Perikanan pada jenis perairan laut nilai LQ tertinggi dan termasuk kedalam basis komoditi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai 1,98 dan bertipologi potensial dan Tanjung Jabung Barat memiliki nilai 1,83 namun bertipologi Prima.
9. LQ Produksi Perairan Umum Berbasis pada 7 wilayah dan Kabupaten Merangin dengan LQ tertinggi 5,83.
10. LQ Perikanan Budidaya Berbasis pada 9 wilayah dan pada Kabupaten Batanghari dengan nilai LQ tertinggi 50,36.
11. LQ Perairan Darat Kolam berbasis pada 8 wilayah dengan Kabupaten merangin LQ 1,98 yang tertinggi, dan Perairan Darat Keramba tidak terdapat wilayah Basis, namun Kota Jambi memiliki nilai LQ tertinggi 0,70.
12. Hasil Analitical Hierarchy Process (AHP) didapat nilai CR = 0,046 dengan usaha perikanan alternatif pengembangan sebagai berikut ;
Peringkat Pertama Perikanan Budidaya, diikuti Perikanan Laut dan Perairan Umum.
13. Hasil Analisa SWOT Strategi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Provinsi Jambi menggunakan Strategi **Strenghts-Threats (ST)**, dengan nilai 4,60 dan berada pada strategi kuadran II atau Diferensiasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan analisis strategi pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat maka beberapa hal yang disarankan dalam strategi ini; perlunya fasilitasi Wadah dan Perairan Budidaya, meningkatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum, pengembangan pakan lokal.



Perlu dilaksanakan kesinambungan konservasi sumberdaya ikan yang ada di perairan daratan. yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik.

Sedangkan untuk saran analisis selanjutnya diharapkan dapat dilakukan studi kemampuan dan potensi usaha industri pengolahan hasil produk perikanan swakelola kelompok masyarakat yang berwawasan lingkungan.

